

**ANALISIS STRATEGI ALI BAAL MASDAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR PERIODE
2017-2022**

**STRATEGIC ANALYSIS OF ALI BAAL MASDAR'S ELECTION FOR GUBERNUR
PERIOD 2017-2022**



**MUH. FAJAR RAMADHAN
E052212009**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**STRATEGIC ANALYSIS OF ALI BAAL MASDAR'S ELECTION FOR GUBERNUR
PERIOD 2017-2022**

**MUH. FAJAR RAMADHAN
E052212009**



**MASTER OF POLITICAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF SOCIAL SCIENCE AND POLITICAL SCIENCE
HASANUDDIN UNIVERSITY
MAKASSAR
2024**

HALAMAN PENGANTAR

**ANALISIS STRATEGI ALI BAAL MASDAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR PERIODE 2017-
2022**

Tesis

Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar magister

Program Studi Ilmu Politik

Yang Diajukan Oleh :



**MUH. FAJAR RAMADHAN
E052212009**

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
2024**

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS STRATEGI ALI BAAL MASDAR PADA PEMILIHAN
GUBERNUR PERIODE 2017-2022**

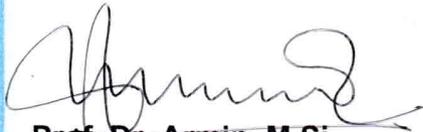
Disusun dan diajukan oleh

**MUH. FAJAR RAMADHAN
E052212009**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin
pada tanggal **08 Juli 2024**
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama,



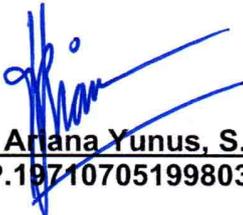
Prof. Dr. Armin, M.Si.
NIP.196511091991031008

Pembimbing Pendamping,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP.197107051998032002

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Politik,



Dr. Ariana Yunus, S.IP., M.Si
NIP.197107051998032002

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Hasanuddin,



Prof. Dr. Phil. Sukri, SIP., M.Si
NIP.197508182008011008

PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA

Dengan ini saya menyatakan bahwa, tesis berjudul "**ANALISIS STRATEGI ALI BAAL MASDAR PADA PEMILIHAN GUBERNUR PERIODE 2017-2022**" adalah benar karya saya dengan arahan dari pembimbing **Prof. Dr. Armin, M.Si** sebagai pembimbing utama dan **Dr. Ariana Yunus, M.Si** sebagai pembimbing pendamping. Karya ilmiah ini belum diajukan dan tidak sedang diajukan dalam bentuk apa pun kepada perguruan tinggi mana pun. Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka tesis ini. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut berdasarkan aturan yang berlaku.

Dengan ini saya melimpahkan hak cipta (hak ekonomis) dari karya tulis saya berupa tesis ini kepada Universitas Hasanuddin.



Makassar, 08 Juli 2024

MUH. FAJAR RAMADHAN
E052212009

KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr.Wb

Alhamdulillahirobbil a'alamin, Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan rahmat kesehatan dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang mengantarkan manusia dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang ini. Penyusunan Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat guna mencapai gelar Magister Ilmu Politik di Universitas Hasanuddin Makassar.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan yang dikarenakan atas keterbatasan pengetahuan yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan banyak kritik dan saran demi penyempurnaan tulisan ini yang kiranya kelak dapat bermanfaat dan digunakan dengan sebaik-baiknya. Begitu banyak rintangan, gangguan, dan ujian yang penulis hadapi selama menyusun skripsi ini hingga pada tahap ujian akhir. Namun berkat adanya bantuan dukungan, dorongan, do'a, serta semangat dari berbagai pihak yang mengiringi perjalanan penulis. Melalui kata pengantar ini, izinkan penulis untuk mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk Orang tua ayahanda tercinta **M.Kamal Nasser** dan ibunda tersayang **dr.hj. Marintani Erna** yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis. Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas keberhasilan penulis dalam penyusunan skripsi ini kepada :

1. **Bapak Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc** selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. **Bapak Dr. Phil. Sukri, S.IP., M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Ibu Dr. Ariana, S.I.P., M.Si** selaku ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Unhas,
3. **Bapak Prof. Dr. Armin, M.Si.** selaku pembimbing I, yang telah memberi nasehat dan bimbingan kepada penulis selama perkuliahan hingga penyelesaian tesis ini.
4. **Ibu Dr Ariana, S.I.P., M.Si** selaku penasehat pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
5. Kepada Bapak Ibu Dosen Prodi Ilmu Politik, **Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si, Prof. Muhammad, S.IP., M.Si, Drs. H. A. Yakub, M.Si., Ph.D, Dr. Gustiana A. Kambo S.IP. M.Si., Dr. Ariana Yunus, S.IP M.Si, Haryanto, S.IP, M.A, Andi Ali Armunanto, S.IP. M.Si., A.Naharuddin S.IP, M.Si., Dr. Muhammad Saad, MA., Dr. Phil. Sukri, S.IP, M.Si, Sakinah Nadir S.IP, M.Si., Endang Sari, S.IP, M.Si, Dr. Muhammad Saad, M.A, Ummi Suci Fathia, S.IP, M.Si, Muh. Imran, S.IP, M.Si, Zuhajar, S.IP, M.Si, Dian Ekawaty, S.IP. M.Si** Terima Kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini, semoga penulis dapat memanfaatkan dengan sebaik mungkin.
6. Seluruh Staf khususnya Departemen Ilmu Politik, serta staf administrasi Pascasarjana di Lingkup FISIP UNHAS tanpa terkecuali. Terima kasih atas bantuan yang tiada hentinya bagi penulis selama ini.
7. Arinil yang selalu memberikan support doa yang terbaik untuk menemani penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Sahabat saya Akzan, fadel, Rifandi. ucok, Farhan yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis penulis.
9. Informan yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian.

Selebihnya terima kasih dan mohon maaf kepada seluruh teman-teman yang terlupa dan tak bisa penulis tuliskan satu-persatu, sesungguhnya kalian tetap teringat sebagai catatan akhir kuliah di kehidupan mahasiswa penulis. Akhirnya penulis menyadari atas segala keterbatasan, untuk itu saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Sekian dan terima kasih.

Makassar, 08 Juli 2024

Penulis,



MUH FAJAR RAMADHAN

ABSTRAK

Muh. Fajar Ramadhan. NIM E052212009. Analisis Ali Baal Masdar Pada Pemilihan Gubernur Periode 2017-2022. Di bawah bimbingan bapak Armin Arsyad dan Ibu Ariana Yunus.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana strategi politik Ali Baal Masdar pada pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Penulis melakukan penelitian studi kasus dengan dasar penelitian kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan mewawancarai informan kunci yang dianggap dapat menjelaskan fokus penelitian ini serta melengkapinya dengan beberapa referensi tertulis seperti data-data dari instansi terkait. Adapun pendekatan dan konsep yang digunakan ialah teori strategi politik serta konsep pemilihan kepala daerah sebagai bagian dari konsep yang dijadikan dalam proses penelitian ini.

Penelitian ini menjelaskan strategi politik yang dilakukan oleh Ali Baal Masdar dalam pemilihan Gubernur tahun 2017 yang di jelaskan dengan 2 (dua) aspek besar *pertama*, menyangkut strategi politik yang dilakukan Ali Baal Masdar dalam mendapatkan pasangan wakil di pemilihan. ada dua langkah yang dibuat oleh Ali Baal Masdar dalam mendapatkan pasangan di pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Pertama, dengan mengandalkan pengalaman Ali Baal Masdar sebagai bupati Polewali Mandar dua periode sebagai nilai jual utamanya. Kedua, dengan melakukan komunikasi politik dengan partai politik yang memiliki suara di DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Ketiga, menjalin komunikasi dengan Enny Anggraeni Anwar. Aspek *Kedua*, strategi Ali Baal Masdar dalam memenangkan pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Ali Baal Masdar melakukan dua langkah besar dalam memastikan kemenangannya dalam pemilihan Gubernur tahun 2017. Dua langkah tersebut ialah, pertama dengan cara memobilisasi jaringan birokrasinya. Kedua, memaksimalkan kerja partai politik yang mengusung Ali Baal Masdar.

Kata Kunci : Strategi, Pemilihan Kepala Daerah, Partai Politik, Birokrasi

ABSTRACT

Muh. Fajar Ramadhan. NIM E052212009. Analysis of Ali Baal Masdar in the 2017-2022 Governor Election. Under the guidance of Mr. Armin Arsyad and Mrs. Ariana Yunus.

This research aims to analyze how Ali Baal Masdar's political strategy in the 2017 West Sulawesi Governor election. The author conducted case study research with a qualitative research base. Data collection is done by interviewing key informants who are considered to be able to explain the focus of this research and complement it with several written references such as data from related agencies. The approaches and concepts used are the theory of political strategy, and the concept of regional head elections as part of the concepts used in this research process.

This research explains the political strategy carried out by Ali Baal Masdar in the 2017 Governor election which is explained by 2 (two) major aspects first, concerning the political strategy carried out by Ali Baal Masdar in getting a deputy partner in the election. there are two steps made by Ali Baal Masdar in getting a partner in the 2017 West Sulawesi Governor election. First, by relying on Ali Baal Masdar's experience as the regent of Polewali Mandar for two periods as his main selling point. Second, by conducting political communication with political parties that have votes in the West Sulawesi Provincial DPRD. Third, establish communication with Enny Anggraeni Anwar. Second aspect, Ali Baal Masdar's strategy in winning the 2017 West Sulawesi Governor election. Ali Baal Masdar took two major steps in ensuring his victory in the 2017 Governor election. The two steps are, first, by mobilizing his bureaucratic network. Second, maximizing the work of political parties that support Ali Baal Masdar.

Keywords: Strategy, Regional Head Election, Political Party, Bureaucracy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGANTAR.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN TESIS	iii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN PELIMPAHAN HAK CIPTA.....	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Penelitian	3
1.3.2 Manfaat Penelitian	3
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	4
2.1 Teori Strategi Politik.....	4
2.1.1 Jenis-Jenis Strategi Politik	5
2.2 Konsep Pemilihan Kepala Daerah	7
2.3 Penelitian Terdahulu	8
2.4 Kerangka Pemikiran.....	9
2.5 Skema Pikir.....	10
BAB III METODE PENELITIAN.....	11
3.1 Lokasi Penelitian.....	11
3.2 Jenis dan Dasar Penelitian	11
3.3 Sumber Data dan Informan Penelitian.	11
3.3.1 Data Primer.....	11
3.3.2 Data Sekunder	12
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	12
3.5 Teknik Analisis Data	13
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	15
4.1 Kondisi Pemerintahan Sulawesi Barat	15
4.2. Kondisi Politik Sulawesi Barat.....	16
4.2.1 Daerah Pemilihan (Dapil) dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.	17
4.3 Pemilihan Gubernur Sulawesi Barat Tahun 2017.	17
4.4 Profil Pasangan Ali Baal Masdar dan Eny Anggreni Anwar	18
4.4.1 Ali Baal Masdar.....	18
4.4.2 Enny Anggraeny Anwar	19
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	20
5.1 Strategi Ali Baal Masdar Mendapatkan Pasangan Wakil Gubernur di Pilgub Sulbar 2017.	20
5.1.1 Memanfaatkan Posisi Bupati Polewali Mandar Sebagai Nilai Jual Mencari Pasangan.....	21
5.1.2 Menjalani Komunikasi dengan Enny Anggraeni Anwar dan Anwar Adnan Saleh.	22

5.1.3 Menjalin Komunikasi dan Meminta Dukungan Partai Politik Serta Elite Lokal.	23
5.2 Strategi Kemengan Ali Baal Masdar dalam Pilgub Sulbar tahun 2017.	25
5.2.1 Mobilisasi Jaringan Birokrasi.....	26
5.2.2 Memaksimalkan Kerja Partai Politik Pengusung.....	28
5.3 Implikasi Teoritis	30
BAB VI PENUTUP	32
6.1 Kesimpulan	32
6.2 Saran	32
DAFTAR PUSTAKA.....	33

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Bupati dan Wakil Bupati) merupakan salah satu media masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dalam memilih dan menentukan figure yang cocok untuk memimpin mereka. Pemilihan secara langsung juga sebagai media perwujudan demokrasi yaitu memilih dengan berdasarkan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat yang dimana kedaulatan tertinggi adalah kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi. Pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat dilepaskan dari adanya pemilihan umum, karena pemilihan umum merupakan konsekuensi dianutnya sistem demokrasi dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Di Indonesia, dalam sistem pemerintahan yang demokratis, harus dikelola sedemikian rupa, sehingga seluruh masyarakat dapat ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui pemilihan umum, baik pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan jajaran eksekutif. Beberapa tahapan dalam pemilihan di eksekutif, baik pemilihan presiden-wakil presiden atau pun kepala daerah dan wakil kepala daerah, meliputi pencalonan kandidat ke Komisi Pemilihan Umum (KPU), kemudian seleksi berkas, pengundian nomor bagi kandidat, yang lolos seleksi, penentuan jadwal kampanye, dilanjutkan dengan kampanye oleh masing masing kandidat, kemudian pelaksanaan pemilihan serta yang terakhir adalah pengumuman resmi oleh KPU/KPUD terhadap kandidat yang dinyatakan menang dalam sebuah pemilihan. Perubahan dalam perpolitikan Indonesia dimulai sejak era reformasi. Hal ini ditandai dengan sistem demokrasi yang lebih terbuka. Langkah terobosan yang dilakukan dalam proses demokratisasi adalah amandemen UUD 1945 yang dilakukan MPR hasil pemilu 1999 dalam empat tahun (1999-2002).

Beberapa perubahan penting dilakukan terhadap UUD 1945 agar UUD 1945 mampu menghasilkan pemerintahan yang demokratis pula, peranan anggota DPR sebagai lembaga legislatif diperkuat, semua anggota DPR dipilih lewat pemilu, Pengawasan terhadap presiden diperketat, dan Hak Asasi Manusia memperoleh jaminan yang semakin kuat, amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan pemilihan Presiden dan wakil Presiden secara langsung dan pertama kali dilaksanakan tahun 2004.¹ Langkah Demokratis berikutnya adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah secara langsung (Pilkada) yang diatur dalam UU No.32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah diseluruh Indonesia dipilih melalui pemilukada mulai pertengahan tahun 2004.

Semenjak itu semua kepala daerah yang habis masa jabatannya harus dipilih melalui proses pemilukada, pemilukada bertujuan untuk menjadikan pemerintah daerah lebih demokratis dengan diberikan hak bagi rakyat untuk menentukan kepala daerah, hal ini tentu berbeda dengan pemilihan kepala daerah sebelumnya yang bersifat tidak langsung karna dipilih melalui DPR.² Pemilihan kepala daerah telah memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memilih calon-calon kepala daerah (gubernur, bupati dan walikota) yang dikehendakinya secara langsung tanpa diwakili oleh DPRD. Sistem pemilihan secara langsung dengan mengumpulkan suara terbanyak seperti ini yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat agar turut berpartisipasi dalam demokrasi politik, karena partisipasi masyarakat dalam menyalurkan suara politiknya akan menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah selama setidaknya lima tahun ke depan.

Pemilihan kepala daerah juga sebagai media masyarakat untuk menyalurkan hak pilihnya untuk memilih calon kepala daerah terbaik sesuai harapan masyarakatnya. Setiap calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah pasti memiliki tujuan untuk memenangkan kompetisi atau persaingan tersebut, semua kandidat tentunya memiliki strategi yang digunakan untuk menang. Strategi kampanye menjadi penting dalam memenangkan sebuah pemilihan, baik pemilihan presiden – wakil presiden ,maupun pemilihan kepala daerah. Menurut Clausewitz, strategi merupakan pengetahuan tentang penggunaan pertempuran untuk memenangkan pertempuran.³ Sedangkan menurut Beaufree, strategi politik merupakan seni yang menggunakan semua kekuatan untuk mencapai semua tujuan yang ditetapkan oleh politik.⁴ Didalam konteks penelitian ini penulis ingin mengetahui strategi memperoleh dan memanfaatkan kekuatan calon-calon kepala daerah dalam pilkada serentak 15 Februari 2017.

Jika merujuk pemilihan-pemilihan Gubernur yang telah di laksanakan di berbagai daerah di Indonesia. Setiap calon yang bertarung dalam kontestasi elektoral berusaha menciptakan dan memanfaatkan kekuatan-kekuatan politik yang ada. Seperti yang terjadi dalam Pilkada Gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Kemenangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dipengaruhi oleh kekuatan politik.

¹ Miriam Budiarto, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama 2008). Hal.134

² Ibid. Miriam Budiarto. Hal. 136.

³ Arifin Anwar, Komunikasi Politik : Paradigma, Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik Indonesia, (Jakarta : PT Balai Pustaka,2013), Hal. 161

⁴ Ibid. Hal. 167.

Yang dalam hal ini, kekuatan politik tersebut ialah kelompok kepentingan. Pada pemilihan tersebut pasangan Anies-Sandi mampu memanfaatkan kelompok 212 untuk mendulang suara dan dukungan masyarakat. Di Jawa Tengah pun juga demikian, Pasangan Ganjar-Yasin berhasil memenangkan Pilgub Jateng tahun 2018 berkat kekuatan politik dari partai politik. Salah satu kekuatan politik adalah partai politik. Diketahui Ganjar-Yasin di usung oleh Partai PDI-P, yang merupakan partai penguasa di Jawa Tengah. Pemanfaatan kekuatan politik juga di perlihatkan oleh pasangan Khofifah-Emil di Pilgub Jawa Timur. Kemenangan pasangan Khofifah-Emil berhasil membangun relasi dan memanfaatkan hubungannya dengan kaum Nahdatul Ulama. Dimana diketahui Jawa Timur merupakan basis dari Nahdatul Ulama.

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu event pemilihan pada tahun 2017 ini diadakan serentak seluruh Indonesia. Pilkada serentak pada gelombang kedua diikuti 101 daerah diseluruh Indonesia. Dengan Rincian 7 Provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Salah satu daerah yang mengikuti atau menggelar pemilihan kepala daerah secara serentak yaitu Provinsi Sulawesi Barat, tentunya menarik untuk diteliti karena keadaan masyarakatnya yang heterogen, sehingga akan menimbulkan berbagai persepsi dikalangan masyarakat yang heterogen tersebut.

Pada tahun 2017 Provinsi Sulawesi Barat berhasil melaksanakan pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur. Di pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2017 ini diikuti oleh 3 pasangan calon yakni. Pasangan nomor urut satu Suhardi Duka mantan Bupati Mamuju maju berpasangan dengan Kalma Katta Mantan Bupati Majene dengan didukung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera. Pasangan nomor urut 2 anggota DPR-RI, Mayjend. TNI (Purn.) Salim S. Mengga turut maju dengan menggandeng seorang pengusaha Hasanuddin Mashud, dan didukung oleh Partai Golkar. Kemudian, Pasangan nomor urut 3 mantan Bupati Polewali Mandar, Ali Baal Masdar maju bersama Anggota DPR-RI yang juga istri Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Enny Anggraeni Anwar dengan didukung oleh Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia.

Dengan hasil pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 Ali Baal Masdar dan Enny Anggraeni Anwar dengan persentase 38,76% atau dengan perolehan suara 244.803 suara dari total 631.627 suara yang menggunakan hak pilih. Kemudian diikuti oleh pasangan nomor urut satu Suhardi Duka dan Kalma Katta yang mengumpulkan suara sebanyak 240.055 suara atau terpaut kurang dari 5.000 suara atau dengan persentase 38.01%. dan yang terakhir pasangan nomor urut 2 yakni Purn. Salim S. Mengga dan Hasanuddin Mashud yang hanya mampu meraih 147.769 suara atau 23,24%.⁵

Dalam menghadapi pemilu seperti pemilihan Gubernur banyak faktor yang harus menjadi fokus para kandidat peserta pemilihan Gubernur ini, diantaranya adalah menciptakan kekuatan politik. Kekuatan politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik yang baik tergantung pada kualitas kekuatan politik. Keberhasilan dalam membentuk kekuatan politik dapat dilihat dari kemampuan aktor tersebut melaksanakan fungsinya.

Dalam kajian kekuatan-kekuatan politik setidaknya ada enam kekuatan politik yang berpengaruh dalam memenangkan kandidat dalam suatu kontestasi elektoral.⁶ Ke-enam kekuatan tersebut ialah, partai politik, media massa, aktor politik, birokrasi, kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Ali Baal Masdar memiliki kekuatan politik lebih dibanding calon yang lain. Dari sisi partai politik. Ali Baal Masdar didukung oleh tujuh parpol yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan total 21 dari 45 kursi DPRD Sulawesi Barat. Jumlah ini terbanyak diantara dua pasangan calon yang lain. Dari sisi aktor politik, Ali Baal Masdar didukung oleh banyak tokoh politik yang berpengaruh selain dirinya yang juga memiliki pengaruh besar. Dengan menggandeng Enny Anggraeni Anwar menambah kekuatan dari segi birokrasi Ali Baal Masdar. Diketahui Enny Anggraeni Anwar merupakan istri Gubernur Sulawesi Barat periode 2013-2017, sedangkan Ali Baal Masdar juga merupakan Bupati Polewali Mandar 2 periode. Penguasaan media massa juga menjadi nilai tambah dari Ali Baal Masdar dalam melengkapi kekuatan politiknya. Dan yang terakhir kedekatannya dengan organisasi-organisasi yang sifatnya kelompok kepentingan dan penekan, Ali Baal Masdar berhasil mengaet kelompok tersebut sebagai suatu kekuatan yang melengkapi usahanya dalam memenangkan pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan

⁵ Diolah dari data KPU RI. Diakses pada laman https://pilkada2017.kpu.go.id/hasil/t1/sulawesi_barat.

⁶ Haniah Hanafie, Kekuatan-Kekuatan Politik, (Jakarta: 2007), Hal. 15.

ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kekuasaan. Pertarungan politik lokal tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh bekerjanya mesin partai, tetapi lebih ditentukan oleh banyak faktor figur, jaringan dan media massa (penguasaan isu). Yang berhasil memilih figur yang tepat akan menjadi pemenang dalam mewarnai perumusan kebijakan lokal, meskipun dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk memahami praktek politik ditingkat lokal.⁷

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi politik Ali Baal Masdar pada pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Dengan batas penelitian merujuk pada bagaimana strategi politik Ali Baal Masdar dalam mendapatkan pasangan dan strategi Ali Baal Masdar dalam memenangkan Pilgub Sulbar tahun 2017. Berdasarkan hal tersebut penulis kemudian tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Strategi Ali Baal Masdar pada Pemilihan Gubernur Periode 2017-2022**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti membatasi rumusan masalah yang akan diteliti, menjadi :

1. Bagaimana strategi Ali Baal Masdar mendapatkan pasangan Wakil Gubernur pada pemilihan kepala daerah Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 ?
2. Bagaimana strategi Ali Baal Masdar memenangkan pemilihan kepala daerah Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017 ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan untuk :

1. Menganalisis strategi Ali Baal Masdar mendapatkan pasangan Wakil Gubernur pada pemilihan kepala daerah Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.
2. Menganalisis strategi Ali Baal Masdar memenangkan pemilihan kepala daerah Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Terdapat beberapa manfaat yang dapat diambil dari pengkajian ini. Peneliti membagi manfaat-manfaat tersebut menjadi manfaat akademik dan manfaat praktis.

A. Manfaat Akademik

1. Sebagai bahan rujukan bagi masyarakat yang berminat memahami bagaimana mempersiapkan diri maju dalam kontestasi politik elektoral.
2. Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, dan bermanfaat bagi pengembangan ilmu politik pada khususnya.

B. Manfaat Praktis

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada tingkat paska sarjana (S2) untuk memperoleh gelar magister pada Departemen Ilmu Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
2. Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penelitian-penelitian di tempat lain.

⁷ Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Politik Indonesia (Laboratorium Ilmu Politik, 2015), Hal. 207.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti menjelaskan aspek-aspek teoritis yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan. Konsep-konsep yang dipaparkan dalam bab ini berkaitan dengan pokok bahasan dan hasil penelitian, yang mana juga diterapkan guna membantu peneliti dalam proses penelitian ini.

2.1 Teori Strategi Politik

Strategi berasal dari bahasa Yunani klasik, yaitu “*stratos*” yang artinya tentara dan kata “*agein*” yang berarti memimpin. Dengan demikian, strategi dimaksudkan adalah memimpin tentara. Lalu muncul kata *strategos* yang artinya pemimpin tentara pada tingkat atas. Jadi, strategi adalah konsep militer yang bisa diartikan sebagai seni perang para jenderal, atau suatu rancangan yang terbaik untuk memenangkan peperangan. Menurut Peter Schorder strategi politik merupakan strategi atau Teknik yang digunakan untuk memujudkan suatu cita-cita politik. Pendapat Peter Schorder mengandung makna bahwa politisi selalu menggunakan Teknik atau cara dalam mencapai cita-cita politiknya. Cita-cita politik umumnya mencapai suatu kemenangan dalam politik.

Sejalan dengan itu, Prihatmoko berpendapat bahwa strategi politik adalah segala rencana dan Tindakan untuk memperoleh kemenangan dan meraih kursi dalam pemilu. Rencana politik dilakukan secara sistematis dalam mencapai tujuan politiknya. Menurut James Q. Wilson (1980) Strategi politik adalah suatu cara untuk mencapai tujuan politik dengan menggunakan pengaruh dan persuasi. Pengaruh dan persuasi itu dilancarkan kepada banyak orang agar tertarik memilih aktor politik atau partai politik guna mencapai tujuan politik. Sejalan dengan itu Harold D. Lasswell Strategi berpendapat strategi Politik adalah Proses perencanaan dan pelaksanaan Tindakan yang mengarah pada pengambilan Keputusan dalam sistem Politik untuk mencapai tujuan tujuan. George Modelski menyatakan bahwa strategi politik adalah proses memilih tujuan politik, menentukan keputusan Keputusan utama yang diperlukan untuk mencapai tujuan tujuan tersebut, serta mengatur serangkaian Tindakan untuk mengimplementasikan Keputusan tersebut Sejalan dengan itu Richard Rumelt berpendapat Strategi politik adalah serangkaian Tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Tindakan itu dapat berupa pemilihan pasangan gubernur dan wakil Gubernur, pemilihan partai politik dan tim sukses guna memenangkan pemilu.

Firmanzah berpendapat merupakan suatu pendekatan yang perlu dilakukan oleh para peserta pemilu untuk memenangkan pemilu. Pendekatan tersebut para peserta dilakukan dengan cara membuktikan kepada para pemilih bahwa peserta pemilu tersebut patut di pilih dalam pemilu.⁸ Para peserta pemilu harus mampu menganalisis kekuatannya untuk menghadap para pesaing politik lainnya, dikarenakan secara tidak langsung strategi ini dilakukan Upaya dalam memenangkan persaingan politik. Robert Dahl berpendapat Strategi politik adalah “Penggunaan sumber daya oleh aktor politik untuk mempengaruhi preferensi, keyakinan, atau Tindakan aktor politik lainnya guna mencapai hasil yang diinginkan. Penggunaan sumber daya, termasuk didalamnya pasangan calon dan orang-orang yang mengelilingi pasangan calon dimanfaatkan untuk mempengaruhi pilihan dalam pemilu guna memenangkan pemilu.

Dikemukakan oleh Karl Von Clausewitz yang merumuskan strategi sebagai suatu seni yang menggunakan sarana pertempuran untuk mencapai tujuan perang, sementara Martin – Anderson merumuskan strategi sebagai seni yang melibatkan kemampuan inteligensi/pikiran untuk membawa semua sumber daya yang tersedia untuk mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien.⁹ Dalam pendeskripsian strategi politik, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pada strategi politik yang digunakan untuk pemenangan pemilu dalam hal ini yakni strategi ofensif dan strategi defensif.¹⁰ Hal ini mengingat bahwa pemaknaan terhadap strategi politik tidak hanya pada pemenangan pemilu saja tetapi juga tentang sebuah perencanaan untuk kinerja sistem dalam struktur politik yang akan terbentuk. Kedua strategi inilah yang digunakan sebagai unit analisa dalam hal pemilihan strategi politik.

Praktisi ilmu politik mencoba mendefinisikan strategi di dalam pertempuran politik. Strategi politik seperti pada semua pertempuran-pertempuran yang kompleks, setiap orang berlaku sesuai dengan rencana yang dipahami lebih dahulu, kurang lebih rencana yang sudah terolah dimana setiap orang membuat antisipasi bukan saja dalam serangan-serangannya, akan tetapi juga tentang jawaban-jawaban lawannya dan alat-alat untuk menyelesaikannya. Rencana perjuangan ini merupakan strategi; unsur-unsur yang berbeda yang ada di dalamnya, tindakan melawan musuh dan jawaban terhadap reaksinya merupakan taktik.

⁸ Firmanzah. 2012. *Marketing Politik (Antara Pemahaman dan Realitas)*. Cetakan Ketiga. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hal. 109

⁹ Prof. Dr. Hafied Cangara, M.Sc, (2009), *Komunikasi Politik*, Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 292

¹⁰ Raquhel Dominique Ning. D.k.k, (2016), *Strategi Incumbent Parpol Mempertahankan Suara Pasca Pindah Partai Pada Pemilu Legislatif Kota Denpasar Tahun 2014*, Jurnal Nawala Politika: Universitas Udayana. Hal. 7-8

Strategi politik itu sendiri adalah sebuah cara yang telah dipahami dan disusun terlebih dahulu untuk merealisasikan cita-cita politik yang digunakan untuk perubahan jangka panjang.¹¹ Perencanaan strategi politik merupakan suatu analisa yang jelas dari keadaan kekuasaan, gambaran yang jelas mengenai tujuan akhir yang akan dicapai dan pemusatan segala kekuatan untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Dalam pendeskripsian strategi politik, maka penulis merasa perlu untuk membatasi pada strategi politik yang digunakan untuk pemenangan pemilu dalam hal ini yakni strategi ofensif dan strategi defensif. Hal ini mengingat bahwa pemaknaan terhadap strategi politik tidak hanya pada pemenangan pemilu saja tetapi juga tentang sebuah perencanaan untuk kinerja sistem dalam struktur politik yang akan terbentuk. Kedua strategi inilah yang akan digunakan sebagai unit analisa dalam hal pemilihan strategi politik.

2.1.1 Jenis-Jenis Strategi Politik

Politisi akan selalu dihadapkan pada berbagai kemungkinan kerjasama dengan pihak lain. Oleh karena itu, perlu mengenal sebelas strategi utama yang diperkenalkan oleh Peter Schroder yaitu: strategi defect, strategi cooperate, strategi random, strategi per kind, strategi per nasty, strategi spite, strategi soft majority, strategi tit for tat, strategi mistrust, strategi prober, dan strategi pavlov.¹²

Pemimpin politik harus pandai mengembangkan alternatif, tidak pendek pikir atau cepat menyerah. Selain disebutkan diatas, masih ada strategi lain: Strategi bumi hangus adalah strategi yang menumpas lawan atau musuh sampai akar-akarnya tanpa ampun dan tanpa mengakomodasikan kembali. Strategi brinkmanship atau strategi permainan jurang. Strategi ini dimaksudkan untuk mengarahkan musuh ke ambang bencana untuk bisa ikut masuk ke dalam jurang bersama lawan dan Penerapannya harus hati-hati dan jeli. Strategi kejutan adalah Keberhasilannya terletak pada betapa tidak siapnya musuh menghadapi yang kita buat. Strategi disinformasi adalah Strategi ini terkait dengan manipulasi informasi, yakni dengan memberikan informasi yang salah atau ngawur (cocok dalam konteks ofensif), atau memberikan informasi secara berlebihan (cocok dalam konteks defensif). Strategi pengakuan atau sentakan pembebasan adalah bentuk strategi defensif untuk mengakhiri perdebatan atau polemik yang berlarut-larut. Pengguna strategi ini berharap akan memperoleh simpati publik.¹³

Hal ini menandakan bahwa Schoder sangat memahami jika pada praktiknya, strategi politik yang dijalankan politisi untuk mencapai tujuan politiknya tidaklah kaku dan seragam. Dalam menjalankan suatu strategi, politisi akan melakukan apapun sepanjang sebuah perencanaan yang diimplementasikan untuk mencapai tujuan politik itu tidak melanggar aturan hukum. Inilah yang menyebabkan strategi politik yang digunakan oleh para politisi tersebut bisa jadi bervariasi, tergantung dari situasi dan kondisi yang dihadapi. Walaupun dalam praktiknya penggunaan strategi politik sangat beragam, namun pada hakikatnya para politisi yang sedang merancang sebuah strategi tetap mengacu pada dua pola dasar, yakni pola ofensif (menyerang) dan defensif (bertahan).¹⁴

Dalam strategi politik dikenal strategi ofensif, strategi ini dibutuhkan apabila partai politik ingin meningkatkan jumlah pemilihnya, harus ada pandangan positif terhadap hal tersebut sehingga cara yang dapat digunakan adalah melalui kampanye politik. Strategi kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.¹⁵

2.1.1.1 Strategi Politik Ofensif

Akan diperlukan bilamana seorang kandidat/partai politik ingin menarik pendukung baru maupun memperluas jumlah dukungan masyarakat. Biasanya kandidat maupun partai politik yang menggunakan pola strategi ofensif ini lebih dikenal sebagai pihak penantang maupun "pendatang baru" yang akan berkompetisi untuk mengincar kursi kekuasaan. Cara yang dapat digunakan adalah melalui kampanye politik. Strategi kampanye adalah suatu proses yang dirancang secara sadar, bertahap dan berkelanjutan yang dilaksanakan pada rentang waktu tertentu dengan tujuan mempengaruhi khalayak sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi kampanye politik yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan dari padanya sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus adapenawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selam ini memilih partai pesaing. Pola ofensif inilah yang disebut

¹¹ Suaib Napir, 2016. *Strategi Pemenangan Fahmi Massiara-Lukman Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2015 Di Kabupaten Majene*, The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin. Vol. 2 No.2, Juli. Hal. 150-151.

¹² Peter Schroder, 2010. *Strategi Politik (Edisi Cetakan Tiga)*. Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit. hal. 129-131

¹³ Alfian Alfian, 2008. *Menjadi Pemimpin Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. hal 304- 305

¹⁴ Peter Schroder, 2010. *Op. Cit.*, hal.104

¹⁵ Toni, Efrizah, Kemal, (2006), *Mengenal Teori-Teori Politik*, Bandung: Penerbit Nuansa, Hal. 187

Schroder sebagai strategi memperluas pasar dan strategi menembus pasar, sebab pola strategi ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut:¹⁶

1. Selalu berusaha menampilkan perbedaan yang jelas dan menarik terhadap pihak pesaing yang ingin diambil alih pemilihnya.
2. Senantiasa menampilkan keuntungan-keuntungan yang akan didapatkan masyarakat bila mendukung pihaknya, yang tidak terdapat pada pihak pesaing.
3. Berusaha menawarkan keunggulan-keunggulan yang dimilikinya yang tidak ditemukan pada pihak pesaing.
4. Selalu berupaya menjadi penyempurna dari program-program yang dimiliki pesaing.
5. Selalu menjanjikan perubahan.

Setiap kampanye politik adalah suatu usaha hubungan masyarakat. Tugasnya adalah membujuk sejumlah pemberi suara yang sudah terdaftar untuk mendukung calon. Kampanye yang berorientasi pada hubungan masyarakat, berusaha merangsang perhatian orang kepada sang calon. Ia mencoba meningkatkan identifikasi dan citra sang calon di antara kelompok pemberi suara, menyebarkan pandangan sang calon tentang berbagai masalah penting, dan mendorong para pemberi suara menuju ke tempat pemilihan untuk memberikan suara kepada sang calon. Pada dasarnya strategi kampanye politik bertujuan untuk membentuk serangkaian makna politis tertentu di dalam pikiran para pemilih. Serangkaian makna politis yang terbentuk dalam pikiran para pemilih tersebut dimaksudkan untuk memilih kontestan tertentu. Makna politis inilah yang menjadi output penting dari strategi kampanye politik.

Strategi kampanye politik yang digunakan untuk mempengaruhi pemilih, yang harus dijual atau ditampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan daripadanya sehingga dapat terbentuk kelompok pemilih baru di samping para pemilih yang telah ada. Oleh karena itu, harus ada penawaran baru atau penawaran yang lebih baik bagi para pemilih yang selama ini memilih partai pesaing.

Secara garis besar bahwa makna politis yang akhirnya tertanam dalam benak pemilih merupakan hasil dari interaksi dua faktor. Pertama adalah kualitas dan kuantitas dari stimulus politik itu sendiri. Kedua adalah rujukan kognitif berupa kesadaran atau alam pikir seseorang yang memaknainya. Apapun ragam dan tujuannya, upaya yang dilakukan kampanye selalu terkait dengan aspek pengetahuan (knowledge), sikap (attitude), dan perilaku (behavioral), yaitu :

1. Kegiatan kampanye biasanya diarahkan untuk menciptakan perubahan pada tataran pengetahuan atau kognitif. Pada tahap ini pengaruh yang diharapkan adalah munculnya kesadaran, berubahnya keyakinan atau meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap isu tertentu.
2. Pada tahap berikutnya diarahkan pada perubahan sikap. Sasarannya adalah untuk memunculkan simpati, rasa suka, kepedulian atau keberpihakan khalayak pada isu-isu yang menjadi tema kampanye.
3. Sementara pada tahap terakhir kegiatan kampanye ditujukan untuk mengubah perilaku khalayak secara kongkrit dan terukur. Tahap ini menghendaki adanya tindakan tertentu yang dilakukan oleh sasaran kampanye.¹⁷ Strategi kampanye di atas perlu untuk diperhatikan sehingga mampu mencapai hasil yang diinginkan. Strategi seperti ini perlu dipersiapkan sebuah kampanye pengantar untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan dengan penawaran partai-partai lainnya dan memanfaatkan situasi dan kondisi yang terjadi dalam masyarakat. Misalnya hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat dalam mensejahterakan hidupnya, dapat menjadi kunci untuk merumuskan strategi ini.

2.1.1.2 Strategi Politik Defensif

Sangat ideal digunakan bagi politisi pemegang kekuasaan maupun partai politik penguasa yang ingin terus berupaya mempertahankan kekuasaannya atau tetap menjaga dominasinya. Strategi ini juga digunakan apabila partai pemerintahan atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila perolehan suara yang dicapai sebelumnya ingin dipertahankan. Dengan melakukan berbagai tindakan yang memiliki ciri - ciri sebagai berikut:¹⁸

1. Berusaha memelihara pemilih tetap mereka dan memperkokoh solidaritas pemilih agar tidak mudah diambil kompetitor lain.

¹⁶ Ibid., hal.105

¹⁷ Ibid., hal. 24-25

¹⁸ Ibid., hal.107

2. Memperkuat pemahaman kepada para pemilih terhadap program-program yang telah mereka anggap berhasil.
3. Berupaya menjalankan operasi disinformasi, dengan mengaburkan perbedaan yang ada dengan pesaing, hingga membuat perbedaan tersebut tidak dapat dikenali lagi.

Selain dari dua pola dasar strategi di atas, Schroder juga menambahkan bahwa dalam keadaan tertentu, politisi maupun partai politik bisa saja menerapkan pola ofensif dan defensif sekaligus yang sering disebut sebagai pola strategi campuran/kombinasi. Satu hal yang juga perlu disadari bahwa walaupun pola ini relatif lebih berisiko, namun pola campuran / kombinasi ini terkadang sangat menjanjikan untuk di implementasikan demi mencapai keberhasilan.¹⁹ Berbagai pola dasar dalam merancang sebuah strategi di atas diharapkan mampu menjadi acuan bagi politisi untuk mewujudkan cita-cita / tujuan politiknya. Kendatipun dalam menjalankan sebuah strategi, tidak ada aturan baku ataupun sebuah keterikatan bagi politisi/partai politik (ketika dihadapkan pada kondisi tertentu), untuk selalu terikat kepada pola strategi yang harus dijalankannya.

2.2 Konsep Pemilihan Kepala Daerah

Pemilu dapat dirumuskan sebagai mekanisme pendelegasian kedaulatan rakyat kepada peserta pemilu dan/atau calon anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah untuk membuat dan melaksanakan keputusan politik sesuai dengan kehendak rakyat. Pemilu juga berarti mekanisme perubahan politik mengenai pola dan arah kebijakan publik, dan atau mengenai sirkulasi elite, yang dilakukan secara periodik dan tertib.²⁰ Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada atau Pemilukada, adalah bagian dari implementasi demokrasi. Kepala Daerah adalah jabatan politik yang bertugas memimpin dan menggerakkan lajunya roda pemerintahan.

Terminologi jabatan publik artinya kepala daerah menjalankan fungsi pengambilan keputusan langsung dengan kepentingan rakyat atau publik, berdampak kepada rakyat dan dirasakan. Oleh karena itu Kepala Daerah harus dipilih oleh rakyat dan wajib mempertanggung jawabkannya. Sedangkan makna jabatan politik adalah bahwa mekanisme rekrutmen kepala daerah dilakukan secara politik yaitu melalui pemilihan yang melibatkan elemen – elemen politik yaitu dengan menyeleksi rakyat terhadap tokoh yang mencalonkan sebagai kepala daerah. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan kegiatan yang nilainya sejajar dengan pemilihan legislative, terbukti kepala daerah dan DPRD menjadi mitra.²¹

Dalam pasal 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 menjelaskan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis.

Peranan Kepala Daerah sangat besar sekali dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Sehubungan dengan hal ini, maka berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai Manajer Daerah yang bersangkutan.²² Keberhasilan seseorang yang menjabat suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas yang dimilikinya.

Pemerintah Daerah terdiri atas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah dibantu oleh satu orang Wakil Kepala Daerah. Kepala Daerah Provinsi disebut Gubernur dan Wakilnya disebut Wakil Gubernur. Sementara itu, Kepala Daerah Kabupaten/Kota disebut Bupati/Walikota dan Wakilnya disebut Wakil Bupati/Wakil Walikota. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: "saran pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah". Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya ekuivalen dengan

¹⁹ Ibid., hal.110

²⁰ Ramlan Surbakti, 2008, Sistem pemilu dan tatanan politik demokrasi, dalam ramlan surbakti, dkk (Ed.), *Perekayasa Sistem Pemilu untuk Pembangunan tata politik demokratis*, Kemitraan Jakarta. Hal. 27

²¹ Agus Hadiawan, 2009, *Evaluasi Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Provinsi Lampung (Studi di Kabupaten Lampung Selatan, Kota Metro dan Kota Bandar Lampung)*, Bandar Lampung, Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan Universitas Lampung, Vol 3, No 7 Juli-Desember 2009. Hal. 637

²² Manullang, *Beberapa Aspek Administrasi Pemerintah Daerah, Pembangunan*, Jakarta, 1983. Hal. 31

pemilihan anggota DPRD. Equivalen tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.

Pasal 56 (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pilihan terhadap sistem pemilihan langsung merupakan koreksi atas Pilkada terdahulu yang menggunakan sistem perwakilan oleh DPRD, sebagaimana tertuang dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Digunakannya sistem pemilihan langsung menunjukkan perkembangan penataan format demokrasi daerah yang berkembang dalam kerangka liberalisasi politik, sebagai respon atas tuntutan perubahan sistem dan format politik pada masa reformasi. Pemilihan Kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh rakyat merupakan suatu proses politik di daerah menuju kehidupan politik yang lebih demokratis dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, untuk menjamin pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang berkualitas, memenuhi derajat kompetisi yang sehat, partisipatif dapat dipertanggung jawabkan.²³

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada atau Pemilukada, merupakan suatu perwujudan dari demokrasi dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang demokratis, dan merupakan suatu perwujudan dari kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.²⁴ Pemimpin daerah adalah jabatan politik yang bertanggung jawab memimpin dan mendorong laju pemerintahan. Pemilihan kepala daerah pada dasarnya merupakan perwujudan dari otonomi daerah, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 disebutkan pelaksanaan pilkada harus dilaksanakan secara demokrasi, berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah temuan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Penelitian terdahulu ini berupaya untuk mencari perbandingan dari penelitian yang akan dilakukan. Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Arya Parama Widya, pada tahun 2019 berjudul "strategi pemenangan pasangan calon Anies Baswedan dan Sandiaga Uno dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017" yang diterbitkan pada naskah skripsi departemen politik dan pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kemenangan Anies dan Sandi ada beberapa hal. Faktor tersebut dikelompokkan menjadi faktor umum dan faktor khusus. Faktor umum kemenangan Anies dan Sandi adalah adanya resistensi terhadap petahana, munculnya politik uang, dan kerjasama relawan dan kader partai politik yang baik. Sedangkan faktor khusus yang melandasi kemenangan adalah munculnya politik identitas dalam masa kampanye serta isu reklamasi yang ditentang oleh pasangan Anies dan Sandi

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama berfokus pada kemenangan salah satu pasangan calon. **Perbedaan** dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian terdahulu yang dilakukan di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017. Berbeda dengan penelitian tesis ini yang mengkaji bagaimana upaya Ali Baal Masdar mendapatkan kekuatan politik dalam menghadapi Pilkada Gubernur Sulbar 2017.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Sanopara. M pada tahun 2023 yang berjudul "Analisis Kemenangan Politik Identitas dalam Pemilihan Gubernur Jambi Tahun 2020 di Kota Jambi". Berdasarkan hasil penelitian tersebut, Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapatnya politik identitas itu tidak bagus di dalam demokrasi yang dapat menggiring opini dan memecah belahkan antara satu dengan lainnya yang dilakukan oleh elit politik dan masyarakat. Terdapat sekitar 900 anggota Paguyuban Wisnu Murti yang menggunakan politik identitas pada saat pemilihan Gubernur Jambi 2020 di Kota Jambi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Kemenangan politik identitas dalam pemilihan Gubernur Jambi tahun 2020 di Kota Jambi menggunakan politik identitas, Hal ini terlihat dari hasil penemuan di lapangan bahwasanya masih ada pengaruh politik identitas pada pemilihan gubernur provinsi Jambi 2020 di Kota Jambi

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama berfokus pada bagaimana melihat dan menganalisis kemenangan calon dalam kontestasi pemilihan. **Perbedaan** dalam penelitian ini adalah ialah analisis dalam melihat kemenangan calon. Penelitian ini melihat dari pemanfaatan politik identitas. Sedangkan penelitian pada tesis ini lebih berfokus pada mengkaji bagaimana upaya Ali Baal Masdar mendapatkan kekuatan politik dalam menghadapi Pilkada Gubernur Sulbar 2017.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Y.F.W Ledy Sereninty P pada tahun 2019 berjudul strategi politik pemenangan sutarmidji-ria norsan pada pemilihan gubernur Kalimantan Barat 2018: ditinjau dari

²³ Diakses pada laman http://www.kpud-pasuruankab.go.id/news/news_detail/286

²⁴ Janpatar Simamora, Eksistensi Pemilukada Dalam Rangka Mewujudkan Pemerintahan Daerah yang Demokratis, Mimbar Hukum, Volume 23, Nomor 1, Februari, 2011, Hal 1.

metode strategi perencanaan politik. Penelitian ini menjelaskan strategi yang dilakukan pasangan calon Sutarmidji-Ria Norsan pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat: Ditinjau dari metode strategi perencanaan politik melalui tahapan-tahapan diantaranya, proses perencanaan strategi dalam SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), Visi, Tugas, Tujuan Akhir, Bidang-bidang Kunci dan Indikator Prestasi, Faktor-faktor analisa lingkungan sekitar, Penilaian Internal (Perkiraan), Analisa SWOT serta pemilihan strategi dan implementasinya. Maka dari metode strategi perencanaan politik tersebut dapat terlihat implementasi strategi yang dilakukan oleh pasangan calon Sutarmidji-Ria Norsan pada pemilihan Gubernur Kalimantan Barat 2018 yang pertama dilakukan adalah dengan cara blusukan, blusukan adalah cara pasangan calon dalam mendekati masyarakat, kemudian dengan cara tersebut pasangan calon datang, menyapa, berbicara dan menghimpun apa yang harus dilakukan untuk wilayah Kalimantan Barat, dengan cara kampanye, mendekati daerah yang bukan basis masa nya menggunakan Money Politic, banyaknya anggota dalam struktur organisasi tim sukses, terjalinya kordinasi yang baik antar tim sukses, dalam kampanye memanfaatkan rekam jejak sebelumnya, mengusung program-program kerja unggulan, keterlinatan kegiatan keagamaan dalam berkampanye serta keterlibatan dalam forum organisasi adat.

Persamaan dalam penelitian ini sama-sama berfokus pada kemenangan salah satu pasangan calon. **Perbedaan** dalam penelitian ini adalah lokasi penelitian terdahulu yang dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018. Berbeda dengan penelitian tesis ini yang mengkaji bagaimana upaya Ali Baal Masdar mendapatkan kekuatan politik dalam menghadapi Pilkada Gubernur Sulbar 2017.

2.4 Kerangka Pemikiran

Pemilihan kepala daerah di Sulawesi Barat di selenggarakan pada tahun 2017 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur. Diantara beberapa nama yang beredar ada nama Ali Baal Masdar yang merupakan mantan Gubernur Sulawesi Barat. Dibeberapa kesempatan Ali Baal Masdar menyampaikan niatnya untuk kembali maju sebagai calon Gubernur Sulawesi Barat di Pilkada tahun 2017. Keseriusan ini juga terlihat dari spanduk dan baliho yang tersebar di setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat. Ali Baal Masdar bukan satu-satu-nya figur yang menyatakan keinginannya untuk maju di perhelatan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Beberapa nama besar beredar di media dan beberapa diantaranya telah memasang spanduk dan baliho di beberapa ruas jalan di sepanjang jalan Provinsi Sulawesi Barat.

Diantaranya Enny Anggraeni Anwar, sebagai mantan wakil gubernur, KH Syibli Sahabuddin sosok kharismatik dan ulama besar Sulbar, memiliki modal sosial serta dan juga ketua DPW PKB, Kalma Katta bupati Majene 2 periode, Suhardi Duka (SDK) mantan Bupati Mamuju serta Ketua DPD Partai Demokrat Sulbar yang kini menjadi anggota DPR RI, Aras Tammauni ketua DPD I Golkar Sulbar, Agus Ambo Djiwa Bupati Pasangkayu yang juga memimpin partai PDI Perjuangan Sulbar, Mayjen TNI Purn Salim S Mengga. Purnawirawan Jenderal mantan anggota DPR RI, H Hendra Singkarru pengusaha sukses yang memiliki basis keluarga politisi mulai dari DPRD hingga DPD dan DPR RI.

Dalam kajian kekuatan-kekuatan politik setidaknya ada enam kekuatan politik yang berpengaruh dalam memenangkan kandidat dalam suatu kontestasi elektoral.²⁵ Ke-enam kekuatan tersebut ialah, partai politik, media massa, aktor politik, birokrasi, kelompok penekan dan kelompok kepentingan. Dalam kontestasi pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Ali Baal Masdar memiliki kekuatan politik lebih dibanding calon yang lain. Dari sisi partai politik. Ali Baal Masdar didukung oleh tujuh parpol yakni Partai Gerindra, Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dengan total 21 dari 45 kursi DPRD Sulawesi Barat. Jumlah ini terbanyak diantara dua pasangan calon yang lain. Dari sisi aktor politik, Ali Baal Masdar didukung oleh banyak tokoh politik yang berpengaruh selain dirinya yang juga memiliki pengaruh besar. Dengan mengandeng Enny Anggraeni Anwar menambah kekuatan dari segi birokrasi Ali Baal Masdar. Diketahui Enny Anggraeni Anwar merupakan istri Gubernur Sulawesi Barat periode 2013-2017, sedangkan Ali Baal Masdar juga merupakan Bupati Polewali Mandar 2 periode. Pengusaan media massa juga menjadi nilai tambah dari Ali Baal Masdar dalam melengkapkan kekuatan politiknya. Dan yang terakhir kedekatannya dengan organisasi-organisasi yang sifatnya kelompok kepentingan dan penekan, Ali Baal Masdar berhasil mengaet kelompok tersebut sebagai suatu kekuatan yang melengkapkan usahanya dalam memenangkan pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017.

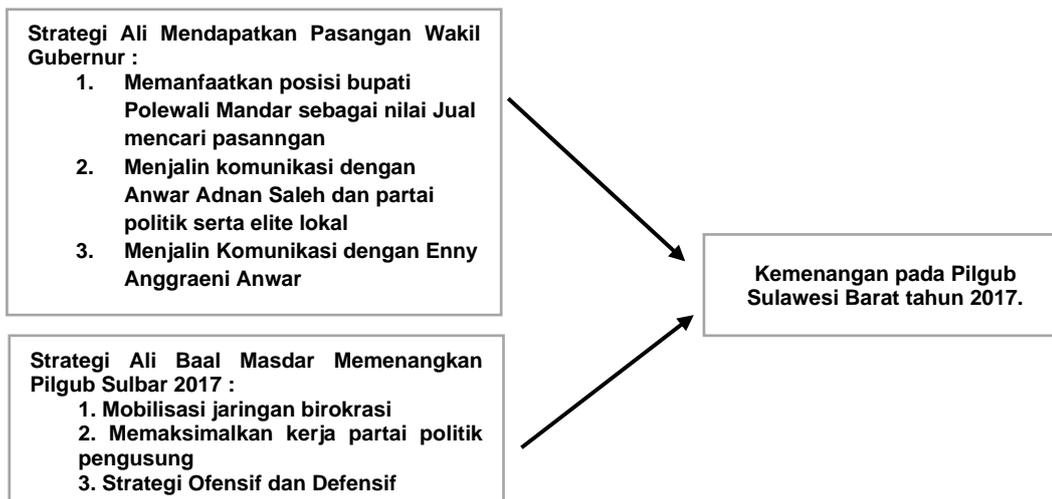
Kekuatan politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Cara yang digunakan oleh aktor politik dalam sistem demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum. Agar memperoleh eksistensi dalam sistem politik, aktor politik harus bersaing dalam pemilihan umum untuk memperoleh suara dari masyarakat dan mendapat kekuasaan.

²⁵ Haniah Hanafie, *Kekuatan-Kekuatan Politik*, (Jakarta: 2007), Hal. 15.

Pertarungan politik lokal tidaklah sepenuhnya ditentukan oleh bekerjanya mesin partai, tetapi lebih ditentukan oleh banyak faktor figur, jaringan dan media massa (penguasaan isu). Yang berhasil memilih figur yang tepat akan menjadi pemenang dalam mewarnai perumusan kebijakan lokal, meskipun dalam kenyataannya tidaklah mudah untuk memahami praktek politik ditingkat lokal.²⁶

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana strategi politik Ali Baal Masdar pada pemilihan Gubernur Sulawesi Barat tahun 2017. Dengan batas penelitian merujuk pada bagaimana strategi politik Ali Baal Masdar dalam mendapatkan pasangan dan strategi Ali Baal Masdar dalam memenangkan Pilgub Sulbar tahun 2017.

2.5 Skema Pikir



²⁶ Syarifuddin Jurdi, Kekuatan-Kekuatan Poliik Indonesia (Laboratorium Ilmu Politik, 2015), Hal. 207.